

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURALIS

oleh: **Abdul Karim**¹

Abstrak

Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa bahasa multikulturalisme merupakan bahasa yang indah namun penerapannya cukup susah. Kecuali, jika pengajaran “yang menghargai perbedaan” di dalam pendidikan Islam bertumpu tidak hanya pada konsep “pendidikan Islam multikulturalisme” yang mendalam, tapi juga pada aspek seleksi input siswanya. Kesimpulan tersebut berbeda dengan kajian terdahulu yang mendeteksi bahwa multikulturalisme dapat diterapkan dalam system pendidikan, dan bahan ajar. Metodologi penulisan makalah ini berasas pada faham menghargai perbedaan (konsep multikulturalisme) yang tetap menghargai adanya kelompok mayoritas dan minoritas (teori kritis).

Keyword: *Pendidikan Islam, Multikulturalisme, Pengajaran.*

A. PENDAHULUAN

Upaya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, sebagai usaha untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan pengajaran, menyebabkan orientasi pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia mengalami perubahan. Namun, menurut Rahman, Indonesia sebagaimana negara-negara muslim lainnya menghadapi masalah pokok dalam pembaruan pendidikan Islam. Masalah itu menurutnya adalah kelangkaan tenaga guru yang memadai untuk mengajar dan riset, dan bagaimana memproduksi tenaga seperti itu. Karenanya, tak bisa dihindarkan lagi dilakukannya percobaan dalam penyempurnaan materi pelajaran Islam klasik dengan pelajaran modern. Kedua mata pelajaran itu dicampurkan dalam berbagai proporsi, tergantung apakah lembaga pendidikan yang bersangkutan termasuk dalam system pendidikan umum. Pada tingkat pendidikan tinggi, melalui percobaan dengan berbagai lembaga yang disebut universitas Islam di Jakarta dan Yogyakarta yang akan menghasilkan sarjana ilmu keislaman. Kurikulum yang dipakai tampaknya mengikuti pola empat fakultas di Al-Azhar yaitu teologi dan syariah atau hukum Islam, pendidikan dan adab, atau humanika Islam, dengan penekanan khusus pada bahasa Arab. Rahman, mempunyai harapan besar untuk Indonesia, ia menyatakan walaupun sekarang ini pendidikan Islam di Indonesia sangat bergantung pada model Al-Azhar, pasti akan mampu mengembangkan suatu tradisi Islam pribumi yang bermakna, yang akan benar-benar bersifat islami dan kreatif.²

Perumusan pemikiran konsep pendidikan Islam yang hendak dikembangkan haruslah dibangun di atas sebuah paradigma yang kokoh spiritual, unggul secara

¹ Penulis merupakan Kandidat Doktor MPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Dosen di FKIP Universitas Muhammadiyah Cirebon

² Fazlur Rahman, “Islam and modernity, transformation of an intellectual tradition,” The University of Chicago, 1982 (terj) Ahsin Mohammad, Pustaka (1985), 1-7.

intelektual, dan agung secara moral dengan Al-Qur'an sebagai acuan yang pertama dan utama. Paradigma model inilah, orang boleh berharap bahwa peradaban yang akan datang tidak berubah menjadi kebidaban yang liar dan brutal.³ Tawaran kurikulum yang sifatnya terbuka bagi kajian kritis dan sains sosial. Rahman, sangat menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analitis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas. Dalam hal ini filsafat berfungsi menyediakan alat-alat intelektual bagi teologi dalam menjalankan tugasnya membangun suatu pandangan dunia berdasarkan Al-Qur'an dan Rahman memandang bahwa penting keterlibatan sains sosial dalam desain pendidikan Islam.⁴

B. PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

Pembaharuan adalah pemikiran, dan usaha-usaha untuk mengubah paham dan adat istiadat, institusi lama untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan paham baru yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵ Pembaharuan adalah proses atau cara membarui yang menghasilkan perubahan dalam penyesuaian situasi dan kondisi.⁶ Pendidikan Islam adalah proses mempersiapkan generasi muda (pembentukan individu) untuk menjalankan kehidupan (sebagai khalifah) dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien berdasarkan sumber-sumber Islam berupa Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Pendidikan Islam yang sebenarnya adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara pengetahuan wahyu dan pengetahuan usaha manusia, keseimbangan antara iman dan takwa (Imtak) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sehingga menghasilkan kesejahteraan spiritual dan material.⁷

Pembaharuan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan cara pandang intelektualisme dalam mengambil manfaat keilmuan baru untuk mengambil fungsi pendidikan sebagai pembangunan umat.⁸ Pembaharuan pendidikan Islam yang dimaksud yaitu modernisasi pendidikan Islam yang terjadi akibat pertemuan Islam dengan Barat dan sebagai tuntutan kebutuhan dunia pendidikan Islam saat ini. Pembaharuan pendidikan Islam pada esensinya adalah pembaharuan pemikiran dan perspektif intelektual, khususnya melalui penerjemahan literatur Eropa yang dipandang esensi ke dalam bahasa Arab, atau melalui pengiriman sejumlah duta dan mahasiswa yang ditugaskan mengenai pendidikan Eropa yang merupakan salah satu rahasia keunggulan mereka. Inti dari pembaharuan pendidikan Islam adalah berupaya meninggalkan pola pikir lama yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman

³ F. Rahman, "Islam and modernity...", 1-7.

⁴ F. Rahman, "Islam and modernity...", 1-7.

⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1989), 1-11.

⁶ Azumardi Azra, "Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju millennium baru," Jakarta: Logos wacana ilmu, 1999. Terdapat di dalam *Lentera Pendidikan*, Vo 16 no. 2 (Desember 2013) 196-204.

⁷ A. Azra, "Pendidikan Islam...", 196-204.

⁸ Harun nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1989), 1-11.

(*future oriented*) dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.⁹ Pembaharuan pendidikan Islam merupakan tuntutan kebutuhan dunia pendidikan Islam saat ini.¹⁰

Perumusan pemikiran konsep pendidikan Islam yang hendak dikembangkan haruslah dibangun di atas sebuah paradigma yang kokoh spiritual, unggul secara intelektual, dan agung secara moral dengan Al-Qur'a>n sebagai acuan yang pertama dan utama.¹¹ Namun, Indonesia sebagaimana negara-negara muslim lainnya menghadapi masalah pokok yaitu kelangkaan tenaga guru yang memadai untuk mengajar dan riset. Karenanya, tak bisa dihindarkan lagi dilakukannya percobaan dalam penyempurnaan materi pelajaran Islam klasik dengan pelajaran modern, kedua mata pelajaran itu dipadukan dalam berbagai proporsi.¹² Selain permasalahan guru, pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Selama ini, upaya pembaharuan pendidikan Islam secara mendasar, selalu dihambat oleh berbagai masalah mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli. Sehingga pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas.

C. PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURALIS

1. Multikultural dan interkultural

Arti kata multikultural adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran atau faham). Kultur adalah sebuah budaya yang universal, sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol, kepribadian yang ditulis dengan luas, refleksi dari struktur biologis, dan ekspresi yang tidak terlihat.¹³ Multikultural adalah masyarakat yang terbentuk dari banyak kelompok budaya berdasar pada ciri suku, ras, agama, bangsa, bahasa,¹⁴ dan pendapatan.¹⁵ Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup

⁹ A. Azra, "Pendidikan Islam....," 196-204.

¹⁰ A. Azra, "Pendidikan Islam....," 196-204.

¹¹ F. Rahman, "Islam and modernity....," 1-7.

¹² F. Rahman, "Islam and modernity....," 1-7.

¹³ Rina Hanipah Muslimah, "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam teks mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA Kelas X" Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010. 1-66.

¹⁴ Semiotik merupakan kajian tentang bagaimana tanda-tanda, termasuk bahasa, menjembatani dunia pengalaman dan pikiran manusia. Oleh karena hanya ada sedikit hubungan alami antara bahasa dan realitas, bahasa sebenarnya membentuk realitas. Salah satu perbedaan utama antara berbagai budaya adalah bagaimana bahasa digunakan, seperti yang ditunjukkan oleh kedua teori-relativitas linguistik serta kode rumit dan terbatas—dalam bagian berikut. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication* (Canada: Thomson Learning Academic Resource Center, 2005), 449-54.

¹⁵ Jessie Lovano-Kerr and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher Education Program in the Arts," *Art Education*, Vol. 30, No. 1, National Art Education Association (Jan., 1977), 34-38.

dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Elizabeth B. Taylor (1832-1817) dan L.H. Morgan (1818-1881) mengartikan kultur sebagai sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Emile Durkheim (1858-1917) dan Marcel Mauss (1872-1950) menjelaskan bahwa kultur adalah sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbo-simbol¹⁶ yang mengikat di dalam sebuah masyarakat untuk diterapkan. Ruth Benedict (1887-1948) dan Margaret Mead (1901-1978) menjelaskan bahwa kultur adalah kepribadian yang ditulis dengan luas; bentuk-bentuk dan sekaligus terbentuknya kepribadian tersebut ditentukan oleh kepribadian para anggotanya. Claude Lévi-Strauss (1908) berpendapat bahwa semua kultur adalah refleksi dari struktur biologis yang universal dari pikiran manusia. E.O. Wilson (1929) dan Jerome Barko (1944) berpendapat bahwa kultur adalah ekspresi yang tidak terlihat dari ciri-ciri genetik khusus.¹⁷

Istilah multikultural secara tidak langsung menyatakan bahwa masyarakat kita terbentuk dari banyak kelompok budaya yang berdasar pada beberapa ciri diantaranya suku, ras, agama, bangsa, bahasa¹⁸, dan pendapatan. Salah satu dimensi dari jenis pluralisme budaya ini adalah kebedaragaman dari perbedaan budaya dalam tiap kelompok seperti perbedaan antara kelompok, yang menggambarkan fenomena dari beberapa individu subkultur yang mungkin berpartisipasi secara utuh, atau terhadap tingkat yang lebih terbatas, pada suatu budaya yang dominan.¹⁹ Adapun Multikulturalisme adalah paham, bahkan politik pengajaran dan nilai keragaman pada tatanan masyarakat plural.²⁰ Dua istilah tersebut sebenarnya terkait erat dengan dunia pendidikan yang satu dengan yang

¹⁶ Teori Basil Bernstein tentang kode-kode rumit dan terbatas menunjukkan bagaimana susunan bahasa yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari mencerminkan dan membentuk asumsi-asumsi dari sebuah kelompok sosial. Teori Bernstein terpusat pada dua kode—rumit dan terbatas. Kode-kode meluas (*elaborated codes*) memberikan cakupan yang luas tentang cara-cara yang berbeda untuk mengatakan sesuatu. Kode-kode ini memungkinkan pembicara untuk menjelaskan gagasan dan maksud mereka. Kode-kode terbatas (*restricted codes*) memiliki cakupan pilihan yang lebih sempit dan lebih mudah untuk memperkirakan bentuk apa yang akan mereka ambil. Kode-kode terbatas tepat digunakan dalam kelompok-kelompok yang memiliki asumsi bersama yang kuat dan sedikit kebutuhan untuk memperluas maksud. Sedangkan kode-kode meluas diarahkan pada kategori-kategori berbeda yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human...*, 449-54.

¹⁷ Rina HM. "Analisis Nilai-Nilai..." 1-66.

¹⁸ Hipotesis Benjamin Lee Whorf tentang relativitas linguistik menyatakan bahwa susunan bahasa sebuah budaya menentukan perilaku dan kebiasaan berfikir dalam budaya tersebut. Teori relativitas linguistik berbeda dari teori konstruksionisme sosial yang dibahas sebelumnya. Dalam konstruksionisme sosial, manusia diyakini menciptakan realitas mereka dalam proses interaksi, sedangkan Whorf dan Sapir mengajarkan bahwa realitas telah ditanamkan dalam bahasa dan sudah memperlihatkan bentuknya. Kedua teori ini berhubungan dengan realitas budaya, tetapi berbeda dalam pendekatannya. SW. Littlejohn dan KA. Foss, *Theories of Human...*, 449-54.

¹⁹ J. Lovano-Kerr and E. Zimmerman, "Multiculture Teacher..." 34-38.

²⁰ Muhammad Yahya, "Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural," Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaudin Makassar. *Lentera Pendidikan*, Vol. 13. No. 2 (Des 2010), 175-191.

lainnya tidak saling mengecualikan (*mutual exclusive*), bahkan dapat dikatakan ibarat dua sisi uang yang berbeda.²¹

Belakangan ini muncul diskusi tentang istilah multikulturalisme dengan interkulturalisme. Multikulturalisme merupakan faham yang ideal namun sulit diterapkan. Multikulturalisme sesungguhnya hanya berperan pada aspek ekonomi dan politik sehingga terjebak pada status quo. Ide interkulturalisme merupakan sebagai temuan aktif dari pergumulan, masalah, kesalahan multikulturalisme.²² Salah satu masalah yang muncul dalam upaya multikulturalisme adalah keterbatasan unsur mana yang dijadikan dasar kebutuhan budaya politik, apalagi jika itu negara bagian.²³

Walaupun pengertian kultur sangat beragam, tetapi ada beberapa titik persamaan yang dapat diambil untuk mempertemukan keragaman definisi-definisi tersebut. Karena pada dasarnya, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristiknya. Conrad P. Kottak menjelaskan bahwa kultur memiliki beberapa karakter khusus. Pertama, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. Kedua, kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Ketiga, kultur adalah sebuah symbol. Symbol dalam hal ini umumnya berbetuk linguistik. Keempat, kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuat yang alami. Kelima, kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Keenam, kultur adalah sebuah model. Ketujuh, kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif.²⁴

Sebuah asumsi penting tentang teori-teori dalam bab ini adalah bahwa masyarakat sendiri merupakan hasil dari interaksi sosial, di mana susunan sosial yang besar dan kecil-hubungan, kelompok, organisasi, dan institusi—dibangun dalam interaksi setiap hari. Interaksionisme simbolis, khususnya dalam karya George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Teori sosiokultural berasumsi bahwa sosiokultural memengaruhi interkasi. Dua teori yang bergantung pada interpretasi budaya—etnografi komunikasi dan etnografi kinerja. Kita harus perhatikan bahwa etnografi memiliki cabang lain, yaitu etnografi kritis. Etnografi kritis berada di balik deskripsi dan interpretasi etnografi untuk mengangkat pertanyaan keadilan, kebenaran, kebebasan, kesejahteraan, dan welas asih.

Etnografi komunikasi melihat pada (1) pola komunikasi yang digunakan oleh sebuah kelompok; (2) mengartikan semua kegiatan komunikasi ini ada untuk kelompok; (3) kapan dan di mana anggota kelompok menggunakan semua

²¹ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", Pluralis dan Multikultural, 175-191.

²² Richard Schechner, "Multiculture at School," TDR (1988), Vol. 36, No. 1, The MIT Press (Spring, 1992), 7-9.

²³ John J. Haldane, "Identity, Community and the Limits of Multiculture," *Public Affairs Quarterly*, Vol. 7, No. 3, University of Illinois Press (Jul., 1993), 199-214.

²⁴ Rina HM, "Analisis Nilai-Nilai...", 1-66.

kegiatan ini; (4) bagaimana praktik komunikasi menciptakan sebuah komunitas; dan (5) keragaman kode yang digunakan oleh sebuah kelompok.

Jika anda sedang bekerja dalam sebuah budaya asing, anda akan mengamati apa yang sebenarnya dilakukan orang dari budaya tersebut—bagaimana mereka menyelenggarakan budaya. Seorang antropolog Victor Turner adalah yang paling terkenal dalam memperhatikan fakta bahwa budaya itu diselenggarakan. Panggung pertama adalah sebuah pelanggaran atau sejenis kejahatan atau mengancam aturan komunitas. Ini diikuti oleh krisis, anggota komunitas menjadi meradang dan memihak pada isu yang mencuat oleh pelanggaran. Pada fase ketiga, terdiri dari perbaikan, anggota budaya melakukan hal yang membetulkan pelanggaran atau mengembalikannya pada pernyataan penerimaan. Penyelenggaraan budaya melibatkan tidak hanya manipulasi dari tubuh itu sendiri, tetapi manipulasi dari berbagai media juga yang mungkin dirasakan oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan.²⁵

2. Pergumulan demokrasi dan multikulturalisme

Demokrasi ideal kita berdasar pada sebuah konsep multikultural, keterbukaan semua masyarakat, minoritas dan mayoritas. Namun sayang sekali, idealisme demokrasi tersebut telah dilanggar oleh sebagian orang. Nilai-nilai Suku dan budaya dan latar belakang perbedaan budaya telah diabaikan untuk menyokong budaya tunggal, nilai system etnosentris. Tak ada nilai kelompok dominan berguna, maupun semua nilai beberapa kelompok yang berguna bagi penyebaran dari satu generasi ke lainnya. Bagaimanapun, ada nilai yang melintasi nilai kelompok tertentu yang lebih potensial untuk memperkaya masyarakat secara keseluruhan.²⁶

Dalam pergumulan sosial, isu multikulturalisme sebenarnya tidak terlepas dari tatanan politik global. Sinyalir bahwa dunia barat yang kini sedang berupaya mengubah tatanan dunia baru agar menjadi “miliknya” mengangkat isu multikulturalisme sebagai tema penting yang ditawarkan dalam mengubah citra masyarakat heterogen. Memang diakui bahwa dalam prinsip pendidikan multicultural, misalnya, pengakuan terhadap perbedaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Hak asasi individu atau kelompok apapun bentuk keunikannya memperoleh tempat yang terhormat di mata multikulturalisme. Dari sinilah kemudian berkembang semangat komunitas yang mencampuradukkan antara keragaman dengan keagamaan, antara yang eksotik dengan yang esotik. Setiap keunikan budaya dibiarkan berkembang, namun pada saat yang sama interaksi trans-budaya yang inferior dengan budaya yang superior dapat menyebabkan semakin lunturnya nilai-nilai budaya pada kalangan minoritas

²⁵ S.W. Littlejohn dan K.A. Foss, *Theories of Human...*, 460-5.

²⁶ J. Lovano-Kerr and E. Zimmerman, “Multiculture Teacher...,” 34-38.

yang cenderung inferior. Karena salah satu elemen pembentuk kebudayaan adalah agama, maka keadaan ini sesungguhnya dapat menggambarkan terjadinya pengikisan nilai-nilai agama secara perlahan.²⁷

Sementara cabang modern dalam tradisi kritis mengidentifikasi sebuah varietas sebuah prasangka struktur sosial yang menekan, cabang post-modern menolak ide yang mempertahankan penyusunan bertanggung jawab terhadap ketidakadilan kekuasaan. Post-modernisme didasari oleh gagasan di mana realitas sosial tetap dihasilkan, dihasilkan kembali, dan diubah dengan kegunaan bahasa dan bentuk simbol lainnya.

Kajian budaya. Kajian budaya meliputi investigasi tata cara budaya yang dihasilkan melalui sebuah perjuangan di antara ideologi-ideologi. Saat ini, nama yang paling berhubungan dengan pergerakan ini adalah Stuart Hall. Para pakar kajian budaya membicarakan budaya dalam dua cara. Definisi pertama adalah ide dasar sebuah masyarakat atau kelompok tenteram, ideologinya, atau cara kolektif di mana sebuah kelompok memahami perasaannya. Definisi kedua adalah prakti atau keseluruhan cara hidup dari sebuah kelompok—apa yang individu lakukan secara materi dari hari ke hari. Teori budaya menegaskan bahwa masyarakat kapitalistis didominasi oleh ideologi khusus kaum elit. Akan tetapi, hegemoni adalah proses yang selalu berubah-ubah, yang Hall sebut pada sebuah negara temporer yang digolongkan oleh sebuah “pertunjukan perjuangan.”

Kajian budaya feminisme. Feminisme mengidentifikasi sebuah sistem patriarkis sebagai sumber dari penekanan terhadap wanita. Sebaliknya, dengan pendekatan ini, kajian budaya feminisme menyarankan bahwa kekuasaan relasi terbentuk dari berbagai macam interaksi sosial dan bahwa bahasa dan bentuk simbolis tetap menciptakan kategori pemikiran seperti halnya hubungan sosial.

Teori kritis ras. Teori kritis ras contoh lain dari pendekatan kajian budaya, berdasarkan pada tradisi modernis dan post-modernis. Teori kritis ras hadir pada tahun 1970-an ketika sekelompok pengacara dan alumni menyadari bahwa kemajuan yang dibuat oleh pergerakan hak sosial yang tidak berkelanjutan dan faktanya, rasisme seperti itu telah dikubur. Pendukung teori kritis ras berbagai beberapa keyakinan. Pertama, pakar teori kritis ras memandang rasisme sebagai hal biasa, umum, atau normal—ini adalah “cara biasa masyarakat mengerjakan urusannya” dan dengan demikian sulit untuk ditunjukkan karena hal itu nampak biasa. Kedua, pakar teori kritis ras menyepakati bahwa dominasi kulit putih di Amerika berfungsi untuk memberikan keuntungan psikologis dan material pada kelompok dominan yang berarti bahwa ada segelintir orang yang tertarik dalam menghapuskan rasisme.²⁸

²⁷ M. Yahya, “Pendidikan Islam...,” *Pluralis dan Multikultural*, 175-191.

²⁸ S.W. Littlejohn dan K.A. Foss, *Theories of Human...*, 481.

Pada awalnya, post-strukturalisme adalah sebuah pergerakan yang berasal dari Prancis dalam bereaksi pada ide-ide semiotik tradisional tentang bahasa. Dalam bidang komunikasi saat ini, pakar post-strukturalis yang paling berpengaruh adalah Michel Foucault. (hlm 483) Walaupun ia menolak bias strukturalis dalam penelitiannya, tulisan-tulisannya menjembatani tradisi post-struktural dan struktural dalam tradisi kritis. Foucault mengatakan bahwa setiap masa memiliki pandangan yang berbeda, atau susunan konseptual yang menentukan sifat pengetahuan dalam masa tersebut. Karakter pengetahuan dalam sebuah masa disebut oleh Foucault dengan episteme atau formasi diskursif.

Teori post-kolonial adalah sebuah kritik tentang kolonialisme yang telah menjadi sebuah susunan budaya yang penting dari periode modern. Eurosentrisme, imperialisme, dan proses-proses kolonisasi dan dekolonisasi—semua cara di mana pengalaman kolonial dapat dipahami sebagai sebuah ideologi dominasi. Penelitian Trinh T. Minh-ha menunjukkan beberapa aspek persimpangan post-kolonial dengan teori komunikasi. Trinh menguji dan mencoba mengacaukan “ideologi yang berakar” atau susunan yang ditentukan dalam berbagai bentuk. Hal yang mengganggu bagi Trinh tentang sistem hegemoni adalah bahwa sistem tersebut biasanya tidak ditandai, tidak menarik perhatian, dan juga dianggap normal: sistem ini menjadi “satu-satunya cara manusia dapat memikirkan sesuatu.” Tujuan Trinh adalah untuk mengacaukan semua bentuk ideologi ganjil, menggantinya dengan sebuah dunia yang pernah dengan banyak pemaknaan yang mungkin terjadi. Trinh menggunakan dua alat bantu utama dalam komunikasi—persimpangan dugaan dan menghargai kemajemukan—untuk mencari gangguan ideologi dominasi. Proyek pascakolonial, singkatnya, menghadirkan masalah tradisi kritis—dominasi, ideologi, dan kekuasaan—pada kancah global.²⁹

Suatu bangsa dipersatukan dengan sebuah budaya yang umum mencakup cabang-cabang budaya, sama halnya ia dapat memenuhi unsur pokok negara. Akan tetapi ada batasan untuk diterapkan dalam kehidupan suatu persatuan negara-negara bagian. Memberikan suatu tanda bagi diskusi berikutnya tidak ada spesifik apriori yang dapat dicegah, akan tetapi secara bersamaan, akibat wajar dari perhimpunan sosial adalah sebuah keterbatasan. Batasan dari multikulturalisme mungkin adalah sebuah perkara yang dibawa ke ranah debat publik persisnya yaitu argumen yang terkait untuk menetapkan—kebutuhan budaya politik dan keberadaan institusi publik yang ada agar terwujud.³⁰

Hal ini juga perlu diingatkan bahwa meskipun identitas nasional mungkin menetapkan dasar dari komunitas politik, tidak semua negara yang ada, pada saat yang sama, dengan sejarah suatu bangsa dan tidak semua sejarah suatu

²⁹ S.W. Littlejohn dan K.A. Foss, *Theories of Human Communication*, 484-8.

³⁰ J.J. Haldane, “Identity...,” 199-214.

bangsa bisa menjadikan dirinya sebagai pondasi bagi perintah politik. Ide Haldane yang pertama memuat kritikan tentang hubungan teori dari liberalism secara filosofis; dengan membandingkan kepada objek utama terhadap nasionalisme inilah yang paling mudah dilaksanakan. Pada tingkat yang lebih luas, apakah itu dapat dicapai? Dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan, jika pada keseluruhan, ia menggabungkan prinsip keadilan terhadap siapa yang layak merasakan ancaman dari tirani patriotik yang dipertimbangkan? Pertanyaan terdahulu adalah tentang persoalan sejarah dan pengembangan budaya kedepan, tentang ketiadaan hal yang umum untuk diungkapkan. Yang terakhir, bagaimanapun, ada hal penting tentang aspek filosofis karena lantaran ia dapat digunakan sebagai sebuah keadilan tertinggi suatu bangsa.³¹

Dengan ini dapat diduga bahwa penolakan awal dari liberalism menyisakan ketidakbermaknaan yang memberikan suatu respon terhadap masalah ini –selain dari menolaknya. Tapi jika menengok ke belakang tradisi panjang dari dasar kebenaran filosofis bagi dasar keadilan dengan menunjuk kepada fakta teologis dari dasar manusia. Naturalisme ditambah nasionalisme menawarkan sebuah prospek tentang nilai inti dari nilai moral universal yang dijaga oleh lingkaran terluar dari akar prinsip politik di dalam sejarah lokal. Bukanlah perkara penting tentang pemilihan antara identitas nasional dan keadilan, tapi melihat apa yang dapat dibuat masyarakat civil suatu bangsa dan nilai politis jika salah satu berfikir bahwa liberalism politis kontemporer telah terbukti tidak mencukupi.³²

Untuk memahami perbedaan antar bangsa, Beck and Moore, serta Hofstede³³ menggunakan kerangka berfikir yang dinamakan dengan dimensi budaya³⁴ nasional. Mereka mengatakan, budaya nasional didefinisikan sebagai nilai, kepercayaan dan asumsi yang dipelajari sejak masa anak-anak, dan terus menerus diajarkan dan dilestarikan sehingga membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Hofstede³⁵ bahwa ada empat dimensi budaya nasional sebagai berikut: pertama, *Power distance* (jarak kekuasaan), yaitu sejauh mana orang percaya bahwa kekuasaan dan status didistribusikan dan menerima kekuasaan secara tidak merata itu sebagai cara yang tepat untuk mengorganisasikan sistem sosial. Kedua, *Uncertainty avoidance* (penghindaran ketidakpastian) yaitu sejauh mana orang merasa terancam dengan keadaan yang tidak pasti atau tidak

³¹ JJ. Haldane, "Identity....," 199-214.

³² JJ. Haldane, "Identity....," 199-214.

³³ Beck and Moore (1995), serta Hofstede (1980, 1991). Terdapat di dalam Geert Hofstede, "Cultural Constraints in Management Theories," *The Executive*, Vol. 7, No. 1 (Feb., 1993): 81-94.

³⁴ Tony Bush and Marianne Coleman mendefinisikan kultur lebih berkaitan dengan aspek-aspek informal dari organisasi daripada elemen-elemen resminya yang selalu dilambangkan dengan gambaran struktur. Kultur fokus terhadap nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan norma-norma individu dan bagaimana persepsi-persepsi ini bergabung atau bersatu dalam makna-makna organisasi. Tony Bush and Marianne Coleman, *Manajemen Mutu...* (2012), 133.

³⁵ Hofstede (1980; 1991) terdapat di dalam G. Hofstede, "Cultural Constraints....," 81-94. Baca juga di dalam T. Bush and M. Coleman, *Manajemen Mutu...*, 60.

diketahui. Ketiga, *masculinity and femininity*. *Masculinity* adalah situasi di mana berbagai nilai yang dominan dalam masyarakat menekankan (lebih) mementingkan uang, harta benda atau materi. *Femininity* adalah situasi dimana berbagai nilai yang dominan dalam masyarakat lebih menekankan pada pentingnya hubungan antar orang, kepedulian pada orang lain dan ketenteraman hidup. Keempat, *Individualism dan Collectivism*. *Individualism* adalah situasi di mana banyak orang dalam masyarakat cenderung memperhatikan dirinya sendiri dan keluarga dekatnya saja. *Collectivism* adalah situasi di mana banyak orang dalam masyarakat cenderung merasa mempunyai ikatan yang kuat dengan satu kelompok yang membedakan dengan kelompok lainnya. Artinya budaya nasional suatu bangsa akan memengaruhi pandangan, sikap dan kemudian perilaku manusia. Lebih lanjut, menurut Hofstede³⁶ bahwa ada perbedaan nilai yang diprioritaskan antar budaya nasional (negara)³⁷ yang akan memengaruhi sikap dan perilaku. Budaya nasional memiliki arti bahwa suatu cara bertindak tertentu lebih disukai, enak, puas, dan komitmen karena dianggap cocok dengan beberapa nilai budaya, daripada yang lain.

3. Landasan multikulturalisme

Secara historis, pendidikan Islam tidak sesempit yang dipahami oleh segelintir orang, yakni adanya di antara mereka memahami pendidikan Islam hanya berkisar pada pendidikan rohaniah semata, tanpa menyentuh pendidikan yang sifatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula bahwa sangatlah tidak tepat anggapan yang mengatakan Islam itu sangat eksklusif dan tertutup, tidak siap menerima perbedaan dan keragaman. Oleh karena itu untuk menilai Islam, seseorang harus memahai Islam secara sempurna atau secara ka>ffah. Dari segi historisnya misalnya, Islam telah mempraktekkan

³⁶ Hofstede (1980, 1991) terdapat di dalam G. Hofstede, "Cultural Constraints...", 81-94. Juga, F. Mas'ud, "Mitos Keuniversalan ...," 10-20.

³⁷ Menurut Hofstede (1993) bahwa karena tingkat individualisme orang Amerika serikat tinggi, maka penekanan pada prestasi dan tanggung jawab individu karyawan dalam perusahaan adalah dianggap baik, karena sesuai dengan nilai budayanya. Sedangkan di Cina, karena tingkat kolektifitasnya tinggi, maka prestasi dan tanggung jawab kelompok dianggap baik, karena hal ini sesuai dengan nilai budaya di Cina. Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di negara yang termasuk *high power distance* (jarak kekuasaan tinggi) seperti di negara-negara Asia Timur, cenderung lebih menggunakan sistem sentralisasi dan sedikit partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Atasan (manajer) yang mendorong atau meminta partisipasi bawahan akan cenderung dinilai kurang cakap (*incompetent*) dan kurang percaya diri. Sebaliknya, partisipasi dan keterlibatan karyawan akan cenderung tinggi di perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara dengan *low power distance* seperti Amerika, Jerman, Australia dan Belanda. Dalam organisasi, *uncertainty avoidance* (penghindaran ketidakpastian) diwujudkan dalam kejelasan rencana, prosedur, kebijakan dan sistem. Berpedoman pada kejelasan prosedur, rencana dan sistem akan membantu karyawan mengurangi ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam menghadapi situasi yang tidak diketahui. Perusahaan-perusahaan Perancis biasanya lebih hirarkhis dan lebih banyak peraturan yang eksplisit daripada perusahaan-perusahaan Amerika. Apa yang dapat berjalan dengan baik di Perancis, Negara dengan *high uncertainty avoidance*, tidak dapat berjalan dengan baik di Amerika, Negara dengan *low uncertainty avoidance*. Peraturan sebagai mekanisme kontrol dan integrasi lebih manjur (efektif) di Perancis daripada di Amerika. G. Hofstede, "Cultural Constraints...", (Feb., 1993), 81-94. Juga, Fuad Mas'ud, "Mitos Keuniversalan...", 10-20.

hidup rukun dalam keragaman, nabi SAW. Membangun Yas}rib yang kemudian menjadi pusat pemerintah, yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Madinah yang terdiri atas keragaman etnis dan latar belakang agama dan kepercayaan, nabi menerapkan konsep Al-Qur'a>n tidak memaksakan umat non-Islam untuk terjadinya konversi ke Islam. Dengan ikhlas umat Islam membangun kebersamaan yang plural di Madinah, namun karena ulah kaum Yahudi dari Bani Nadhir, maka nabi kemudian memerintahkan mengusir mereka dari Madinah.³⁸

Secara filosofis, gagasan penerapan multikulturalisme perlu dilandasi pengetahuan yang berupa konsep-konsep relevan dan mendukung keberadaan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dan perbedaan yang sederajat, suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, dominan privat dan publik, dan hak asasi manusia (HAM).³⁹

Secara politis, isu multikulturalisme tidak terlepas dari tatanan politik global. Sinyalir bahwa dunia barat yang kini sedang berupaya mengubah tatanan dunia baru mengangkat isu multikulturalisme sebagai tema penting yang ditawarkan dalam mengubah citra masyarakat heterogen. Memang diakui bahwa dalam prinsip pendidikan multikultural misalnya, pengakuan terhadap perbedaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Hak asasi individu atau kelompok apapun bentuk keunikannya memperoleh tempat yang terhormat di mata multikulturalisme.⁴⁰

Secara normatif tidak ada masalah dalam ketentuan suatu ajaran agama, semua berujung pada kebaikan universal, baik dalam relasi vertikal antara manusia dengan Allah (hablun min Alla>h), maupun dalam relasi horizontal sesama manusia (hablun min al-na>s), baik di dunia maupun di akhirat kelak. Risalah agama diturunkan kepada umat manusia untuk mengembangkan cita-cita luhur, sebagai panduan ila>hiyah bagi perwujudan tatanan makhluk yang damai, penuh rahmat, harmonis, adil dan sejahtera.⁴¹

4. Multikulturalise, Islam dan Pendidikan

Salah satu elemen pembentuk kebudayaan adalah agama, maka keadaan ini sesungguhnya dapat menggambarkan terjadinya pengikisan nilai-nilai agama⁴² secara perlahan.⁴³ Akan tetapi dalam konteks Islam, multikulturalisme tidak berseberangan dengan nilai-nilai agama. Risalah agama diturunkan kepada umat

³⁸ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 175

³⁹ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 176

⁴⁰ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 176

⁴¹ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 177

⁴² M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 175-191.

⁴³ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 175-191.

manusia untuk mengembangkan cita-cita luhur, sebagai panduan ilahiah bagi perwujudan tatanan makhluk yang damai, penuh rahmat, harmonis, adil dan sejahtera. Secara ideal tidak ada masalah dalam ketentuan normatif agama, semua berujung pada kebaikan universal, baik dalam relasi vertikal antara manusia dengan Allah (*hablun min Allah*), maupun dalam relasi horizontal sesama manusia (*hablun min al-nas*), baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun secara faktual, tidak jarang, agama justru menjadi dalih untuk memicu konflik, atau minimal menjadi sumber pembenaran atas berlangsungnya sengketa berdarah. Sampai-sampai sebagian sosiolog berpendapat, bahwa agama disamping berfungsi sebagai pemersatu, juga pemecah belah, seperti misalnya faktor fanatisme agama yang menjadi pemicu terjadinya perang salib (yang banyak merugikan kedua belah pihak).

Dari aspek pendidikan, rekomendasi UNESCO berpesan; pertama bahwa pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain.⁴⁴ Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.⁴⁵ Salah satu upaya ke arah tersebut adalah melalui pendidikan multikulturalis. Dalam konteks pendidikan umum, pembaharuan pendidikan multikulturalis dilakukan melalui multidimensi. Ia didesain untuk menyediakan guru ke depan dengan sebuah pengetahuan yang berdasar pada beberapa dimensi berikut: (1) pengetahuan sejarah sosial, (2) pengetahuan psikologi sosial, (3) pengetahuan antropologi, (4) pengetahuan estetis, (5) kompetensi mengajar, dan (6) penilaian kepribadian.

Program pengembangan pendidikan multikultural terdiri dari sebuah inti dari mata pelajaran pendidikan dasar khusus dengan sebuah fokus multikultural dan bagian dari pengalaman komunitas yang luas. Proyek ini berdasar pada filsafat pendidikan bahwa pendidikan multikultural adalah bagus untuk setiap orang dan menyediakan kesempatan khusus untuk berpartisipasi dalam pengalaman belajar yang secara kultur sangat beragam.⁴⁶ Supaya dapat memanfaatkan pengetahuan dan mampu mendesain, mengajar, dan mengevaluasi pengalaman pendidikan

⁴⁴ R.H. Muslimah, "Analisis Nilai-Nilai...", 1-66.

⁴⁵ Rina HM. "Analisis Nilai-Nilai...", 1-66.

⁴⁶ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher...", 34-38.

multikultural membutuhkan murid yang berbeda latarbelakang budayanya, program ini menyediakan tiga komponen pengalaman umum: (1) pengalaman kelas, (2) pengembangan bahan pembelajaran, dan (3) pengalaman lapangan.⁴⁷

Pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang menghasilkan nilai plurasime budaya. Pendidikan multikultural menolak pandangan bahwa sekolah akan mencoba meleburkan perbedaan budaya. Malahan, pendidikan multikultural menegaskan bahwa sekolah akan berorientasi menghadapi pengayaan budaya dari semua murid melalui program yang mengakar kepada pemeliharaan dan perlusan perbedaan budaya sebagai suatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

5. Pendidikan Islam multikulturalis

Jika merujuk pada pesan dan program tersebut, maka konsep dan praktik pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani.⁴⁹ Maka untuk menuju masyarakat madani, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih salah satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan umum atau mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif, misalnya mempersiapkan para ulama dan mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia.⁵⁰

Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern, sehingga dominasi pendidikan yang terkategori maju dan berperadaban modern didominasi oleh pendidikan di Barat yang konotasinya non-muslim. Sehingga diperlukan konsep pendidikan Islam yang mampu menjawab seluruh tantangan yang kini telah mengglobal, serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana dan prasarana. Lembaga-lembaga pendidikan harus mampu memenuhi keinginan untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat untuk menimba ilmu umum dan ilmu agama serta keterampilan. Tetapi kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan model yang telah dilakukan lembaga-lembaga pendidikan umum yang diterapkan di lembaga

⁴⁷ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher..."34-38.

⁴⁸ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher..." 34-38.

⁴⁹ M. Yahya, "Pendidikan Islam..." 175-191.

⁵⁰ M. Yahya, "Pendidikan Islam..." 182

Islam sehingga akibatnya beban kurikulum yang terlalu banyak dan cukup berat dan bahkan terjadi tumpang tindih.⁵¹

Selain dua hal di atas, tawaran kurikulum yang sifatnya terbuka bagi kajian-kajian filsafat dan sains sosial. Rahman, sangat menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analitis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas. Dalam hal ini filsafat berfungsi menyediakan alat-alat intelektual bagi teologi dalam menjalankan tugasnya membangun suatu pandangan dunia berdasarkan Al-Qur'an. Rahman memandang bahwa penting keterlibatan sains sosial dalam desain pendidikan Islam.⁵²

6. Multikultural dalam pengajaran

Pengajaran multikultural adalah sebuah area yang konsen pada bidang pendidikan yang tepat karena berasumsi bahwa beberapa kelompok yang berbeda secara kultur dari kelompok dominan adalah keniscayaan. Ide ini mengembangkan, mengesahkan, dan menyebarkan kepada seluruh peserta sebuah pernyataan tentang pendidikan multikultural.⁵³ Pengajaran guru menjadi salah satu penerapan konsep tentang pluralisme budaya. Implementasi pluralisme budaya ini harus menjadi bagian integral dari pengajaran guru. Ia dibutuhkan tidak hanya mata pelajaran khusus atau pengalaman pembelajaran khusus yang melekat pada program reguler juga ia dapat menyerap semua aspek dan semua level dari pengajaran guru. Untuk kebermaknaan yang sesungguhnya, kegiatan belajar mengajar multikultural bagi guru diharapkan meliputi partisipasi aktif dalam perbedaan pengalaman belajar tentang multikultural.⁵⁴

Menurut Sayyid Quthb, materi pendidikan (pelajaran harus mampu menstimulir fitrah peserta didik, baik itu fitrah rohani, akal dan perasaan, sehingga memberikan corak serta sekaligus mewarnai segala aktivitas hidupnya di muka bumi, baik sebagai khaliq al-ardh maupun sebagai hamba. Bentuk materi pelajaran yang demikian akan mampu menghasilkan sosok peserta didik sebagai manusia seutuhnya (al-insan kamil). Selanjutnya dalam kaitannya dengan macam pendidikan Muhammad Quthb berdasarkan ciri manusia yang baik dan oleh sistem Islam tersebut, diusahakan diterapkan di dunia nyata, yaitu keterpaduan yang lengkap, keserasian, kepositifan, realisme yang idealis.⁵⁵

Penerapan pendidikan multikultural, paling tidak, terhadap (rekrutmen) siswa, lembaga, program, dan kurikulum.⁵⁶ Penerapan pengajaran dalam pendidikan multikultural juga sebaiknya memadukan antara isu dan masalah

⁵¹ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 175-191.

⁵² F. Rahman, "Islam and modernity...", 1-7.

⁵³ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher...", 34-38.

⁵⁴ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher...", 34-38.

⁵⁵ M. Yahya, "Pendidikan Islam...", 175-191.

⁵⁶ Richard Schechner, "Multiculture at School," TDR (1988-), Vol. 36, No. 1, The MIT Press (Spring, 1992), 7-9.

dengan disertai kegunaan praktis dari sebuah metode persiapan mengajar guru yang meliputi juga seluk beluk penggunaannya.⁵⁷

7. Studi kasus rekrutmen murid

Secara fakta, lembaga pendidikan yang muridnya datang dari berbagai perbedaan budaya hasilnya lebih baik dibanding lembaga pendidikan yang muridnya dari persamaan budaya, seperti di Oberlin dan Ball di Amerika. Bahkan dari sisi latar belakang murid, murid yang berasal dari keluarga pekerja jauh lebih aktif dibandingkan dengan murid yang berasal dari keluarga ekonomi menengah. Selain itu, perbedaan budaya menghasilkan lulusan yang kreatif dalam bekerja, sedangkan lulusan satunya lagi cenderung materialisme.⁵⁸

Asosiasi perguruan tinggi Amerika untuk fakultas pendidikan telah mengembangkan, mengesahkan, dan menyebarkan kepada seluruh peserta sebuah pernyataan tentang pendidikan multikultural yaitu: tidak ada satu model Amerika. Mereka mengartikan pendidikan multikultural sebagai: pendidikan yang menghasilkan nilai plurasime budaya. Pendidikan multikultural menolak pandangan bahwa sekolah akan mencoba meleburkan perbedaan budaya atau pandangan bahwa sekolah, akan melulu, bersabar menghadapi pluralism budaya. Malahan, pendidikan multikultural menegaskan bahwa sekolah akan berorientasi menghadapi pengayaan budaya dari semua murid dan pemuda melalui program yang mengakar kepada pemeliharaan dan perluasan perbedaan budaya sebagai suatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat Amerika, dan ia menegaskan bahwa perbedaan budaya ini adalah sumber berharga yang akan dipelihara dan dikembangkan. Ia juga menegaskan bahwa umumnya institusi pendidikan akan berusaha keras untuk memelihara dan mempertinggi pluralisme budaya.⁵⁹

Aturan kampus dan universitas berkenaan dengan pengajaran guru menjadi salah satu penerapan konsep tentang pulralisme budaya di dalam program mereka. Implementasi pluralism budaya ini harus menjadi bagian integral dari pengajaran guru. Ia dibutuhkan tidak hanya mata pelajaran khusus atau pengalaman pembelajaran khusus yang melekat pada program regular juga ia dapat menyerap semua aspek dan semua level dari pengajaran guru. Untuk kebermaknaan yang sesungguhnya, kegiatan belajar mengajar multikultural bagi guru diharapkan meliputi partisipasi aktif dalam perbedaan pengalaman belajar tentang multikultural. Walaupun banyak area konten yang dapat dan siap didesain untuk memasukan partisipasi aktif ini, wilayah pendidikan seni, sejarah, telah menekankan partisipasi aktif dengan proses kebajikan dan produksi dan

⁵⁷ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher...", 34-38.

⁵⁸ R. Schechner, "Multiculture...", at School," 7-9.

⁵⁹ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher...", 34-38.

memiliki potensi natural yang menekankan perbedaan nilai budaya yang melekat pada bidang seni.⁶⁰

Ketika menulis itu semua, Sechechner telah mengunjungi beberapa kampus dan memulai membuat formula beberapa opini mengenai mahasiswa, fakultas, program, dan kurikulum universitas negeri Ball di Muncie, Indiana, dan kampus Oberlin di Oberlin, Ohio, keduanya merupakan sekolah bagian tengah, jadi mungkin keduanya tipikal kampus Amerika Tengah. Kampus Ball adalah sebuah institusi publik yang memiliki murid yang datang dari Indianan paling banyak dan berbagai Negara bagian. Sekolah ini terkenal dengan tim basketnya. Selama Sechechner di sana, sebuah GOR besar sedang dalam penyelesaian. Oberlin, yang tertua, sebagai kampus seni liberal yang terkenal dengan muridnya yang datang dari berbagai Negara, adalah diidentifikasi dengan yang paling baik dalam penampilan seni dan pandangan gerejanya. Diakui bahwa kunjungan singkat Sechechner ke teater dan departemen tari dari kedua sekolah itu memberikannya hanya kesan impresi anekdot. Pertama, murid di kampus Ball lebih antusias, enerjetik, dan semangat dari pada yang di Oberlin. Sechechner mendapatkan kesan pengaruh bahwa murid kampus Ball, banyak yang datang dari keluarga kelas pekerja, masih memiliki banyak karakteristik optimis dari impian Amerika klasik. Murid di Oberlin, beberapa orang datang dari keluarga profesional (termasuk beberapa orang tua sebagai professor di universitas), tergantung pada sebuah jalan yang mendistribusikan ke Sechechner. Perilaku tidak terlalu segan (yang mana seorang professor meyakinkan Sechechner apa yang ia lihat) tapi sebuah jenis kelemahan, perasaan hampa tentang tidak hanya masa depan tapi juga situasi yang sekarang. Kenapa tidak banyak dilakukan murid MOS, dan sebgaiian mahasiswa lama terkejut dan terkaget tentang prospek mereka pada masa perang dingin dunia?⁶¹

Kebanyakan murid kampus Ball baik yang junior dan dan senior mencari karir di teater dan guru pendidikan dasar. Sechechner sadar bahwa banyak harapan akan bertubrukan dengan Holliwood, NY, or Cicago. Masih, ambisi yang diungkapkan pengabaian kesehatan itu fakta ekonomi. Mungkin murid Oberlin terlalu duniawi sekarang ini. "Fakta ekonomi," seperti halnya fakta sejarah pada semua jenisnya, yang dibuat oleh generasi muda dimana mereka belum terlalu cukup pengetahuan untuk menerima nasihat anggota gereja mereka, tak dapat terelakkan. Mereka yang tahu pada usia muda acapakali terlalu konservatif untuk melakukan sesuatu kecuali menahan dan memelihara status quo.⁶²

Model rekrutmen murid pendidikan Islam multikulutralis, belajar dari kasus di atas, berarti system rekrutmen murid yang memadukan antara idealism

⁶⁰ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher...", 34-38.

⁶¹ R. Schechner, "Multiculture...", 7-9.

⁶² R. Schechner, "Multiculture...", 7-9.

sekolah dengan penerimaan keberagaman murid sejak proses input atau seleksi penerimaan murid baru. Dalam praktiknya, semua perbedaan murid baik bahasa, suku, budaya, dan agama diakomodir secara menyeluruh tanpa dibeda-bedakan. Hanya saja, idealism sekolah Islam juga harus menjadi pertimbangan, terutama bagi sekolah yang khusus. Untuk itu, pihak sekolah harap membuat pola persentase dalam penerimaan murid baru, kelompok mayoritas tetap mendapat porsi kursi lebih besar dari pada kelompok minoritas. Selain idealism tersebut ada juga idealism kompetensi atau kemampuan murid. Kemampuan murid yang tinggi, bagi yang pandai, akan mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan dengan murid yang kemampuannya rendah.

Selain konteks rekrutmen murid, pendidikan seni multikultural adalah sebagai nilai bagi setiap orang dalam masyarakat kita. Seni di dalam projek masyarakat multikultural menunjukkan posisi ini dan sebagai percobaan untuk pindah dari sebuah studi isu dan masalah melibatkan dalam pendidikan multikultural kepada kegunaan praktis dari sebuah metode persiapan mengajar guru yang meliputi seluk beluk penggunaan seni, budaya dan pendidikan.⁶³

D. PENUTUP

Tidak ada multikulturalisme di dalam pendidikan, utamanya di dalam pengajaran, jika muridnya tidak beragam. Karena budaya itu merupakan faktor bawaan murid, maka pengajaran multikulturalisme akan berjalan dengan sendirinya seiring dengan hadirnya perbedaan latarbelakang mereka. Begitupun, pembaharuan pendidikan Islam multikulturalis merupakan usaha modernisasi pemahaman akan perbedaan budaya sebagai sebuah keniscayaan diawali dari latar belakang murid melalui program pengajaran dan pembaruan sistem penerimaan murid baru.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azumardi. "Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millennium Baru." Jakarta: Logos wacana ilmu, 1999. Terdapat di dalam *Lentera Pendidikan*, Vo 16 no. 2 (Desember 2013): 196-204.
- Haldane, John J. "Identity, Community and the Limits of Multiculture." *Public Affairs Quarterly*. Vol. 7, No. 3. University of Illinois Press (Jul., 1993): 199-214.
- Hofstede, Geert. "Cultural Constraints in Management Theories." *The Executive*, Vol. 7, No. 1 (Feb., 1993): 81-94.
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication* (Canada: Thomson Learning Academic Resource Center, 2005), 449-54.

⁶³ J. Lovano-Kerr et.al, and Enid Zimmerman, "Multiculture Teacher...", 34-38.

- Lovano-Kerr, Jessie and Enid Zimmerman. "Multiculture Teacher Education Program in the Arts." *Art Education*, Vol. 30, No. 1, National Art Education Association (Jan., 1977): 34-38.
- Muslimah, Rina Hanipah "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam teks mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA Kelas X." Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010): 1-66.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Rahman, Fazlur. "Islam and modernity, transformation of an intellectual tradition." The University of Chicago, 1982 (terj) Ahsin Mohammad, Pustaka (1985): 1-7.
- Schechner, Richard "Multiculture at School." *TDR* (1988), Vol. 36, No. 1, The MIT Press (Spring, 1992): 7-9.
- Yahya, Muhammad. "Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural." Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaudin Makassar. *Lentera Pendidikan*. Vo. 13. No. 2 (Des 2010): 175-191.